

## RINGKASAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) UUJNP bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Berdasarkan penelitian permulaan yang dilakukan penulis terdapat 5 (lima) Notaris yang telah mengimplementasikan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu di Wilayah Purwokerto. Faktanya masih ditemukan adanya kendala terkait perbedaan interpretasi dan implementasi Pasal 37 ayat (1) UUJNP oleh Notaris di wilayah Purwokerto, serta hambatan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi Notaris dalam memenuhi kewajiban sesuai amanat undang-undang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris di Wilayah Purwokerto.”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban Notaris dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu di Wilayah Purwokerto dan Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat pemberian jasa hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu oleh Notaris di Wilayah Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penulisan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka dan disajikan dalam bentuk teks naratif, data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil Implementasi kewajiban Notaris dalam memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di Wilayah Purwokerto telah berjalan dengan baik. Pelaksanaannya dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pembebasan honorarium, layanan konsultasi hukum gratis, serta pembuatan akta untuk kepentingan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip, para Notaris di Wilayah Purwokerto yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJNP serta menjunjung tinggi etika profesi. Namun demikian, secara operasional, pelaksanaan kewajiban tersebut belum didukung oleh standar baku atau petunjuk teknis yang jelas. Dan terdapat faktor yang mendukung dan menghambat Notaris dalam mengimplementasikan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma. Faktor yang mendukungnya yaitu diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUJNP, Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 7, faktor kemanusiaan, dan faktor keyakinan seseorang Notaris bahwa klien yang menghadap tergolong orang yang tidak mampu. Faktor yang menghambatnya yaitu disebabkan oleh beberapa faktor yakni norma yang tidak jelas pada Pasal 37 ayat (1) UUJNP yang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kriteria orang yang tidak mampu, kebutuhan operasional kantor, dan membayar gaji pegawai/staff kantor. Persoalan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum menurut Robert Seidman yaitu aspek aturan hukum, aspek institusi pelaksana, dan aspek kelompok sasaran.

Kata kunci : notaris, implementasi, kendala, jasa hukum cuma-cuma

## SUMMARY

A notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authority as referred to in the law. Notaries have an obligation stated in Article 37 paragraph (1) of the UUJNP that Notaries are obliged to provide legal services in the field of notary free of charge to people who cannot afford it. Based on the initial research conducted by the author, there are 5 (five) Notaries who have implemented the provision of free legal services for underprivileged people in the Purwokerto Region. In fact, there are still obstacles related to differences in the interpretation and implementation of Article 37 paragraph (1) of the UUJNP by Notaries in the Purwokerto area, as well as obstacles in the implementation of the duties of the Notary position. This results in difficulties for Notaries in fulfilling their obligations according to the mandate of the law. Therefore, the author is interested in conducting research with the title: "Implementation of Notary Obligations in Providing Free Legal Services for Unable People Based on the Law on Notary Positions in the Purwokerto Region."

This study aims to analyze the implementation of the obligation of Notaries in providing free legal services for the underprivileged in the Purwokerto Region and analyze the factors that support and hinder the provision of free legal services for the underprivileged by Notaries in the Purwokerto Region. This study uses an empirical juridical method with analytical descriptive research specifications. The writing uses primary data types and secondary data. The data collection method uses interviews and literature studies and is presented in the form of narrative texts, the data is analyzed qualitatively.

Based on the results of the implementation of the Notary's obligation in providing free legal services to the underprivileged community in the Purwokerto Area, it has gone well. The implementation is carried out in various forms, including honorarium exemptions, free legal consultation services, and the making of deeds for social interests. This shows that in principle, Notaries in the Purwokerto Region who provide free legal services to the underprivileged community have carried out their obligations in accordance with the provisions of Article 37 paragraph (1) of the UUJNP and uphold professional ethics. However, operationally, the implementation of these obligations has not been supported by clear standards or technical instructions. And there are factors that support and hinder Notaries in implementing the provision of free legal services. The factors that support it are regulated in Article 37 paragraph (1) of the UUJNP, the Notary Code of Ethics Article 3 number 7, the humanitarian factor, and the belief factor of a Notary that the client who is facing is classified as an incapable person. The factors that hinder it are caused by several factors, namely the unclear norm in Article 37 paragraph (1) of the UUJNP which does not explain further about the criteria for people who are unable to afford it, office operational needs, and paying the salaries of office employees/staff. These problems can be analyzed using the theory of the working of law according to Robert Seidman, namely the aspect of the rule of law, the aspect of the implementing institution, and the aspect of the target group.

Keywords: notary, implementation, obstacles, free legal services